

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1997, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) semakin merajarela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstiran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.¹

Besarnya dampak krisis keuangan 1997, yang akhirnya menjadi krisis moneter di Indonesia tahun 1998. Membuat presiden Soeharto harus membuat dan mengambil kebijakan-kebijakan agar keadaan membaik. Namun upaya yang Soeharto lakukan tidak membuat keadaan semakin membaik. Masyarakat menjadi semakin resah, demonstrasi mahasiswa semakin memanas. Keadaan ini diperparah dengan terjadinya kerusuhan masa dan pembantaiaan terhadap etnis Cina.²

Krisis ini pun menjadikan akhir dari masa jabatan presiden Soeharto yang telah 30 tahun menjabat kursi pemerintahan. Krisis ini memaksa presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai seorang Presiden karena merasa

¹ Sri R. Merdekawati, *Detik-Detik Tumbangnya Orde Baru*, (Bogor: Regina Eka Utama, 2010), hlm.29

² James Luhulima, *Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto dan Beberapa Pristiwa Terkait*, (Jakarta: Kompas, 2001), hlm: 121

telah kehilangan kepercayaannya dari masyarakat dan dukungan politik dari para pendukungnya untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai seorang Presiden.

Akhirnya tepat pada tanggal 21 Mei 1998, presiden Soeharto tepat pukul 09.06 membacakan pidato pengunduran dirinya di Istana Merdeka. Setelah Soeharto selesai mengucapkan pidato pengunduran dirinya, selanjutnya B.J. Habibie langsung mengucapkan sumpah presiden.³ Dengan demikian maka jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya saat itu, yaitu B.J. Habibie yang secara otomatis naik menjabat sebagai seorang presiden.

Dengan naiknya B.J. Habibie menjadi presiden banyak sekali tugas dan kewajiban yang harus diemban olehnya. Langkah-langkah kebijakan untuk menuju reformasi pun harus diambil untuk menstabilkan kembali keadaan negara. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Habibie dimulai dengan membuka pintu demokrasi selebar-lebarnya. Melakukan reformasi diberbagai aspek baik ekonomi, politik, dan hukum.

Kebijakan-kebijakan yang Habibie ambil yaitu, dalam bidang ekonomi Habibie membentuk UU yang membahas tentang penghilangan praktik-praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, kemudian memberikan perhatian khusus terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), revitalisasi Lembaga Perbankan dan keuangan Nasional, serta program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Di bidang politik Habibie memperbaharui berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan yang bernuansa berpolitik pada pemilu sebagaimana yang

³ James Luhulima, *Hari-hari Terpanjang....*, hlm: 1-3

diamanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di bidang politik beliau melakukan peninjauan kembali Undang-Undang Subversi.⁴

Lahirnya kembali demokrasi memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menyuarakan aspirasinya dan dalam menentukan jalan politiknya. Hal tersebut memberikan angin segar kepada perpolitikan di Indonesia. Keadaan ini dijadikan kesempatan yang baik untuk membentuk sebuah partai yang mewakili jiwa masing-masing orang. Dalam kesempatan itu maka lahirlah partai-partai baru, termasuk lahir pula beberapa partai yang berlandaskan Islam. Partai-partai tersebut dapat ikut serta dalam pemilu asalkan partai-partai tersebut telah memenuhi syarat sebagai sebuah partai dan dapat ikut serta dalam pemilu harus sesuai, seperti yang telah tertera dalam undang-undang pasal 82 UU No. 3 Tahun 1999.⁵

Tuntutan-tuntutan gencar dari berbagai kelompok masyarakat terhadap perlunya penyelenggaraan pemilu yang dipercepat, mengharuskan MPR melakukan sidang istimewa pada bulan November 1998 dan menghasilkan Ketetapan MPR nomor XIV/MPR/tahun 1998 tentang perubahan atas Ketetapan MPR nomor III/MPR/Tahun 1988 tentang Pemilihan Umum yang menjadwalkan pemilu dilaksanakannya bulan Mei atau selambat-lambatnya bulan Juni 1999 yang kemudian menghasilkan penyelenggaraan pemilu pada bulan Juni 1999.⁶ Pemilu ini merupakan langkah kebijakan politis yang Habibie ambil untuk

⁴ Kutipan Pesan Presiden B.J. Habibie dalam siaran di TVRI pada malam setelah beliau mengucapkan sumpah Presiden

⁵ Tim Biro Humas KPU, *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit KPU, 2004), hal: 187

⁶ Tim Biro Humas KPU, *Pemilu 1999 Dalam Angka*, (Jakarta: Penerbit KPU2004), hlm: 293

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang mana kita ketahui saat itu pemerintah telah kehilangan kepercayaanya dari masyarakat.

Partai Islam pun ikut mengambil peran serta dalam pemilu ini beberapa partai Islam baru pun muncul dalam daftar peserta pemilu 1999. Seluruh partai Islam baik yang baru terbentuk maupun yang telah terbentuk jauh sebelum era reformasi saling berlomba mendapatkan suara masyarakat dalam pemilu ini. Partai-partai tersebut adalah PPP, PKB, PBB, PK, PAN, Partai KAMI, Masyumi Baru, PKU, PUI, PSII, PSII 1905, PNU, PID dan PUMI.⁷

Dengan keadaan yang baru ini semua partai harus menghadapi kenyataan dampak baik dan buruknya sebuah kebebasan berdemokrasi sema orang dapat menyuarakan pendapatnya dan dengan bebas dapat menyalurkan hak-haknya tanpa dihalang-halangi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam membuat Islam dijadikan sebagai dasar partai-partai ini terbentuk. Landasan tersebut menjadi modal pasrtai-partai ini untuk mampu bersaing dengan partai yang bukan berazaskan Islam. Dengan segala landasan dan latar belakang pemikiran Islam partai-partai Islam ini mulai menarik perhatian masyarakat dengan tidak menghilangkan aspek-aspek dasar agama Islam.

Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pada era reformasi, persaingan antar partai baik partai yang berasaskan Islam dan yang non Islam begitu sangat terasa. Gerbang demokrasi yang telah Habibie buka membuat semangat para pendiri partai begitu antusias mengusahakan dalam menyuarakan suara rakyat. Dalam pemilu ini partai Islam masih mendapatkan tempat dihati

⁷ Tim Biro Humas KPU, *Nuansa Pemilihan Umim di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit KPU, 2004), hal: 186 lihat pula Tim Biro Humas KPU, *Pemilu 1999 Dalam Angka*, (Jakarta: Penerbit KPU, 2004), hlm: 238

rakyat dengan banyaknya suara yang didapat. Hal tersebut masih terlihat pula pada pemilu 2004 yang mana persentase hasil pemilu meningkat dari pada pemilu 1999.

Partai Islam yang akan penulis bahas antara lain adalah PPP, PKB, PK, PAN dan PBB. Yang mana PPP merupakan partai yang lahir akibat dari kebijakan politik Soeharto yang ingin mempersempit gerak perpolitikan bangsa. Kemudian PKB adalah partai yang lahir dari tubuh NU dan PBB yang merupakan partai penerus Masyumi, kedua partai ini lahir pada masa awal era reformasi dan merupakan pecahan dari PPP. Kemudian lahir pula partai PK yang kini menjadi PKS dan juga PAN. Kelima partai ini merupakan partai Islam yang masih eksis hingga saat ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana awal terjadinya reformasi?
2. Bagaimana perkembangan partai-partai Islam pada awal era reformasi pada tahun 1999-2004?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui awal terjadinya reformasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perkembangan partai-partai Islam pada tahun 1999-2004.

D. Langkah-Langkah penelitian

Sejarah dapat dipahami sebagai segala peristiwa dan kejadian pada dimensi waktu atau masa yang telah berlalu. Dimana peristiwa-peristiwa merupakan tersebut direkonstruksi secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan masalah.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Dalam metode penulisan sejarah harus melalui beberapa tahapan, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.⁸

1. Heuristik

Tahap heuristik merupakan tahap awal dalam penelitian sejarah. Dalam tahapan ini merupakan tahapan mencari dan mengumpulkan sumber atau data-data yang diperlukan,⁹ yaitu melalui setudi pustaka.

a. Sumber Tulis

- Sebuah karya dari B.J. Habibie sebuah catatan harian selama menjabat sebagai presiden dalam bentuk karya tulis buku yang berjudul Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Menuju Demokrasi.
- AD-ART hasil Muktamar PPP.
- AD-ART hasil Muktamar PBB.
- AD-ART hasil Muktamar PKB.
- AD-ART hasil Muktamar PK.

⁸ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm: 90

⁹ Sulasman, *Metodologi....*, hlm: 90

- AD-ART hasil Muktamar PAN.
 - Artikel-artikel dari media masa surat kabar Kompas
 - 1) Tumbuh dari Pluralisme, 27 April 2000
 - 2) Gejolak Rupiah Tuntut Pembentukan Politik, 13 September 1997
 - 3) Pejuang Mahasiswa Perlu di Dukung, 20 Mei 1998
 - 4) Reformasi di Mata Rakyat Kecil, 22 Mei 1998
 - 5) Dunia Sambut Mundurnya Presiden Soeharto, 22 Mei 1998
 - Artikel-artikel dari media masa surat kabar Pikiran Rakyat
 - Menyelamatkan Indonesia yang merupakan hasil karya suara-suara Mahasiswa UI yang disusun oleh pers mahasiswa UI yaitu Suara Mahasiswa UI.
 - Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto hasil karya James Luhulima seorang wartawan surat kabar harian Kompas.
 - Pemilu Dalam Angka yang merupakan arsip hasil dari pemilu 1999.
- b. Sumber Visual (sumber berupa data berbentuk foto, video, dan film dokumenter)
- Video dokumentasi kerusuhan demonstrasi Mahasiswa
 - Video detik-detik pidato mundurnya Presiden Soeharto dan pengucapan sumpah presiden B.J. Habibie

- Foto-foto dampak krisis yang bersumber dari media masa surat kabar Kompas dan Pikiran Rakyat.
- Foto-foto dokumentasi pemilu 1999 yang juga bersumber dari beberapa surat kabar.

Dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan sumber sekunder untuk mendukung hasil penelitian dengan aspek teoritik yang terkait dan pendekatan yang berupa buku-buku, sebagai berikut:

- 1) Sulasman, *Metodelogi Penelitian Sejarah*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2014
- 2) Aam Abdillah, *Pengantar Ilmu Sejarah*, CV Pustaka Setia: Bandung, 2012
- 3) Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Tiara Wacana: Yogyakarta, 2013
- 4) Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009
- 5) Sri Rejeki Merdekawaty, *Detik-Detik Tumbangnya Orde Baru*, Regina Eka Utama: Bogor, 2010
- 6) Baskara T. Wardaya, *Menguak Misteri Kekusaan Soeharto*, Galang Press: Yogyakarta, 2008
- 7) Zaenaln Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, LP3ES: Jakarta, 2003

Dan tambahan sumber jurnal Lepi T. Tarmidi, dengan judul *Krisis Moneter Indonesia: Sedad, Dampak, Peran IMF dan Saran*. Jurnal ini merupakan revisi

dan updating dari pidato pengukuhan Guru Besar Madya pada FEUI dengan judul “*Krisis Moneter tahun 1997/1998 dan Peran IMF*” pada 10 Juni 1998 di Jakarta.

2. Kritik

Pada tahapan ini, sumber data yang dihimpun kemudian diuji kredibilitasnya melalui kritik yang tujuannya adalah untuk menyeleksi data dan fakta.¹⁰ Disamping itu kritik merupakan tahapan pengujian dalam menganalisis sumber, mengenai otentisitas dan kredibilitas sumber secara interen dan eksteren.

a. Eksteren

Dalam tahap keritik eksteren sumber tulisan ini dapat di lihat sebagai berikut:

Dalam tahap keritik eksteren sumber buku, peneliti melakukan penyelidikan terhadap biografi para penulis buku tersebut agar dapat diketahui kredibilitas sumber tersebut. Untuk artikel yang bersumber dari surat kabar peneliti melakukan perbandingan surat kabar yang satu dengan surat kabar yang lain agar kesingkronan berita dapat didapatkan. Untuk sumber video peneliti melakukan kajian terhadap pembuat video tersebut.

b. Interen

Pada tahapan ini seorang sejarawan harus cermat dan berhati-hati dalam memilih danmemilah sumber-sumber dan data-data yang telah diperoleh dan menentukan sumber mana saja yang akan digunakan.

Dalam kririk interen ini untuk sumber buku peneliti melakukan kritik terhadap isi buku dengan membandingkan buku yang satu dengan buku lainnya

¹⁰ Sulasman, *Metodologi....*, hlm: 101

yang memiliki pembahasan materi yang sama. Dan untuk artikel surat kabar peneliti melakukan kritik isi tulisan dalam artikel tersebut dengan membandingkan isi artikel tersebut dengan artikel dari surat kabar yang lain dengan pokok pembahasan yang sama.

3. Interpretasi

Dalam tahap ini peneliti berusaha memberikan pendapat peneliti dengan tidak mengutamakan keobjektifan semata dengan tetap tertuju pada sumber-sumber yang didapat tanpa memihak pada seorang tokoh dan tanpa mementingkan kepentingan pribadi.¹¹

Dalam penelitian mengenai partai-partai Islam pada awal era reformasi tahun 1999-2001 ini termasuk kedalam sejarah politik sosial. Sejarah politik merupakan sejarah yang mana didalamnya membahas semua tentang peristiwa dan kegiatan yang berkaitan dengan perpolitikan dan tata negara. Dan sedangkan sejarah sosial merupakan cabang dari ilmu sejarah yang mengkaji tentang struktur sosial dan proses interaksi antara sesama individu dalam sebuah struktur kelompok masyarakat sebagai pelaku sejarah.

Dampak sosial yang disebabkan karena terjadinya krisis moneter mendesak masyarakat untuk memberontak pada pemerintahan orde baru dan meminta agar dilaksanakan reformasi terhadap tatanan negarayang menyebabkan runtuhnya masa orde baru dan lahirilah era reformasi.

Dengan berakhirnya masa orde baru merupakan awal dari lahirnya era baru yaitu era reformasi. Sebagaimana dari adanya tuntutan dari masyarakat

¹¹ Sulasman, *Metodologi....*, hlm: 107

melalui demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai pengaspirasi suara rakyat, yang meminta untuk adanya perombakan secara menyeluruh terhadap tatanan pemerintahan yang di klaim telah melenceng jauh dari UUD'45.

Perombakan ini juga berakibat pada sistem perpolitikan yang berjalan. Kebebasan berdemokrasi dalam berpolitik menyebabkan banyak orang menggunakan haknya untuk bebas berpolitik. Kebebasan ini membuka jalan politik setiap orang selebar-lebarnya. Partai politik sebagai mana dikatakan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik*, partai politik memiliki fungsi sesuai dengan sistem yang dianut negara tersebut. Indonesia sendiri menganut sistem demokratis yang mana partai politik di negara demokratis partai politik memiliki fungsi antara lain, adalah: 1) sebagai sarana komunikasi politik, 2) sebagai sarana sosialisasi politik, 3) sebagai sarana rekrutmen politik, 4) sebagai sarana pengatur konflik (Conflict management).¹²

Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi karena partai politik merupakan tempat untuk menampung berbagai pendapat dan aspirasi yang kemudian jika terdapat keseragaman pendapat maka pendapat tersebut digabungkan dan dapat dirumuskan menjadi kebijakan-kebijakan partai. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai penyebar rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga di dalam partai politik terjadi arus perputaran informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai sarana sosialisasi politik partai politik memiliki peran untuk menyampaikan kepada masyarakat “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-

¹²Uraian tentang fungsi partai politik didasarkan pada Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal: 405-409

nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sosialisasi politik juga berperan untuk menciptakan citra (*image*) bahwa partai memperjuangkan kepentingan umum, dengan mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dengan menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan nasional.

Sebagai sarana rekrutmen politik partai politik berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan dengan merekrut sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggota. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pengatur konflik karena potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, baik dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Partai politik memiliki peran untuk membantu mengatasinya atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan sedemikian mungkin. Dengan demikian partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dan pemerintahnya.

Pada masa orde baru partai politik oleh pemerintah dipersempit gerak politiknya dari yang sebelumnya terdapat beberapa partai, pada masa ini oleh Soeharto partai politik dipersempit hanya menjadi tiga partai yaitu partai Golkar, PDI, dan PPP. Penyempitan ini menyebabkan mau tidak mau semua anggota partai harus berusaha untuk menjaga keharmonisan agar partai tetap terus berjalan.

Awal era reformasi dengan dibukanya gerbang demokrasi fungsi sarana komunikasi politik yang sebelumnya terbatas kini kembali terbuka. Pendapat dan aspirasi dapat kembali bebas diungkapkan karena semakin banyaknya aspirasi tersebut dan adanya perbedaan pendapat yang terjadi ditubuh internal partai maka partai politik baru dibentuk untuk menampung pendapat dan aspirasi yang senada. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi perpecahan yang berakibat pada pengnon-aktifan partai.

Hal tersebut juga terjadi di tubuh partai PPP, orang-orang yang tidak setuju dengan pandangan yang dimiliki partai Islam saat itu yaitu PPP juga memiliki kepentingan, tujuan, dan ideologi politik yang sama berkumpul dan membentuk suatu partai yang kemudian lahir beberapa partai baru dan Islam menjadi landasannya. Partai-partai ini harus bersaing baik dengan sesama partai Islam maupun partai nasionalis pada awal era reformasi.

Perkembangan partai-partai ini pada awal era reformasi dapat dilihat melalui hasil pemilu, yaitu pada pemilu 1999 dan 2004. Antusiasme masyarakat dalam memberikan suaranya dalam pemilu dapat memberikan pandangan bagaimana partai tersebut berkembang ditengah erupora demokrasi.

Dengan demikian, penulis menggunakan penafsiran sosiopolitik yang mana penafsiran ini merupakan penafsiran dengan melihat gejala sosial yang akhirnya berdampak pada kondisi perpolitikan bangsa Indonesia.

4. Historiografi

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Tahapan ini merupakan tahap penulisan dari semua data-data yang telah didapatkan dan menyusunnya secara sistematis dan kronologis, agar menjadi sebuah hasil karya studi sejarah sebagai sebuah kisah.¹³ Pada tahapan ini penulis berupaya merekonstruksi data-data yang telah didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

Pada tahapan ini penulis menggunakan tahap sistematika penulisan sejarah. Maka dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan kedalam 4 bab pokok pembahasan yang isinya antara lain, sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan, bab ini merupakan bagian awal dari tahap penulisan karya ilmiah ini. Dalam bab ini berisikan latar belakang ketertarikan penulis pada pokok permasalahan yang diangkat juga ide-ide pokok permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Selain dua hal tersebut dalam bab ini penulis juga menjelaskan bagaimana sistematika penyusunan karya ilmiah ini, mulai dengan pemilihan sumber dengan tema terkait, lalu pemilahan antara sumber primer dan sumber sekunder.

Dan terakhir dalam bab ini juga penulis menjelaskan sedikit pandangan penulis tentang pokok permasalahan yang penulis angkat. Dan terakhir penulis juga menuliskan bagaimana sistematika yang penulis gunakan untuk penyusunan karya ilmiah ini.

Bab selanjutnya adalah BAB II di mana bab ini penulis memberi judul “Latar Belakang Runtuhnya Masa Orde Baru dan Lahirnya Era Reformasi”. Yang

¹³ Sulasman, *Metodologi....*, hlm: 148

mana dalam bab ini penulis mulai menuliskan bagaimana kronologi tumbangnya masa orde baru yang ditandai dengan mundurnya presiden Soeharto dari kursi kepemimpinannya, yang kemudian digantikan oleh wakilnya yaitu bapa B.J.Habibie yang juga menjadi tanda sebagai lahirnya era yang baru yaitu era reformasi.

Kemudian BAB III yang penulis beri judul “Partai Islam Awal Era Reformasi tahun 1999-2004”, dimana dalam bab ini penulis akan memaparkan profil lima partai Islam besar, pemilu 1999 dan keikutsertaan partai-partai Islam dalam pemilu 1999 juga perkembangan partai-partai Islam hingga pemilu 2004

BAB IV, merupakan bab terakhir dalam penyusunan makalah ini yang juga merupakan penutup, berisikan kesimpulan yang penulis ambil setelah melakukan studi kasus dan pendalaman terhadap pokok permasalahan yang penulis angkat.